

KATA PENGANTAR

Seni tradisi lokal yang hidup dan berkembang di suatu komunitas budaya masyarakat merupakan ekspresi akan hidup dan kehidupannya. Sebagai ekspresi hidup dan kehidupannya, ia merupakan media untuk mengungkapkan pandangan hidupnya, serta menjadi sumber inspirasi bagi tegaknya kehidupan spiritual, moral dan sosial.

Namun, kedudukan dan fungsi seni tradisi lokal yang demikian itu dewasa ini semakin mengalami marginalisasi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Penyebab internal mengandaikan kurangnya upaya-upaya dari pelaku seni tradisi untuk mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya, sehingga seni tradisi sebagai ekspresi hidup dan kehidupan masyarakatnya dianggap telah *out of date*. Dengan situasi internal demikian, upaya-upaya pelestarian dan terlebih lagi upaya-upaya pengembangan seni tradisi semakin sulit mendapat ruang apresiasi.

Penyebab eksternal dapat dikaji dari beberapa sisi. Tiga di antara penyebab eksternal yang terpenting dan berlangsung secara simultan adalah: (1) proses globalisasi yang didominasi budaya Barat; (2) hegemoni negara dengan konsep "budaya nasional" yang mengkooptasi "budaya daerah"; dan (3) hegemoni agama formal (*organized religion*) yang lebih mengedepankan pendekatan syariah daripada pendekatan spiritual, moral dan sosiologis.

Pertama, globalisasi. Perkembangan globalisasi yang demikian cepat dan luas jangkauannya telah mengakibatkan terpinggirkannya seni tradisi. Hal ini terjadi antara lain karena kerasnya persaingan antar budaya sebagai konsekuensi logis dari globalisasi. Derasnya arus informasi dan komunikasi telah berlangsung secara timpang, yakni dikendalikan dari dan oleh budaya Barat yang menobatkan diri sebagai negara-negara dunia kesatu. Banjir informasi dan komunikasi ini tidak segera mendapat respon masyarakat lokal, baik melalui resistensi melawan budaya asing maupun melalui integrasi mutualisme dengan budaya asing, dengan cara memperkuat budaya lokalnya, termasuk di dalamnya seni tradisi.

Seni budaya asing yang lebih modern nampaknya lebih mampu menangkap dan lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan cepat yang terjadi di masyarakat, serta lebih memenuhi selera generasi muda yang telah jenuh dengan kepengapan kungkungan tradisi. Sementara

seni tradisi lokal dianggap cenderung statis, baik dari aspek substansi, materi, maupun metodologinya. Akibatnya, ia dianggap tidak lagi memadai untuk mewartakan kebutuhan dan ekspresi masyarakat yang terus berkembang pesat. Konsekuensi berikutnya yang tak terhindarkan adalah ditinggalkannya seni tradisi lokal dan diadopsinya seni budaya asing yang dianggap lebih sesuai dengan karakter kemoderenan.

Kedua, hegemoni negara. Dari segi politik, dalam skala nasional telah terjadi hegemoni kekuasaan yang berlebihan, yang mengakibatkan terjadinya pemberangusan terhadap simbol dan warna perbedaan, terutama yang kritis terhadap kekuasaan. Dari segi budaya, kekuasaan yang ada, terutama semasa Orde Baru, merupakan kekuasaan yang anti-pluralitas. Atas nama stabilitas dan kesatuan kultural, segala sesuatu harus diseragamkan dan di-asas-tunggalkan. Tidak ada celah bagi wacana perbedaan, apalagi wacana kritik terhadap kekuasaan.

Seni tradisi yang merupakan ekspresi hidup dan kehidupan, serta sumber inspirasi gerakan spiritual, moral dan sosial dari suatu komunitas lokal, seringkali menjadi pendorong bagi sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, penguasa negeri ini, terutama semasa kekuasaan Orde Baru yang berlangsung lebih dari tiga dekade, telah menghilangkan *elan vital* seni tradisi lokal tersebut. Sebagai akibatnya, seni tradisi mengalami kemandegan; ia hanya menjadi komoditas ekonomi pariwisata dan tidak lagi menjadi spirit atau ruh yang menggerakkan dinamika peradaban masyarakatnya. Seni tidak lebih dari sebuah ornamen tradisi. Hilangnya dimensi filosofis sebagai sumber pandangan hidup (spiritualitas, moralitas dan semangat sosial) tersebut pada gilirannya mengakibatkan seni tradisi sulit berkembang, dan multikulturalisme digantikan oleh uniformitas dan ketunggalan "budaya nasional".

Ketiga, hegemoni agama formal. Pemutlakan nilai-nilai seni sering dilakukan oleh otoritas yang *established*, seperti oleh negara sebagaimana telah diulas di atas, dan juga oleh *organized religion*. Sejarah banyak mencatat kasus-kasus ketegangan antara seni tradisi dengan otoritas keagamaan, dan menyaksikan bagaimana suatu seni tradisi "dimatikan" oleh lembaga agama. Beberapa contoh di Indonesia yang dapat disebut, misalnya penyair Hamzah Fansuri yang dinilai membawa ajaran *tasawuf* yang heterodok. Pemerintahan teokratis kerajaan Aceh memberi ganjaran hukuman mati kepadanya. Masih banyak contoh-contoh lain, sebut saja misalnya eksekusi pancung untuk

Syekh Siti Jenar, pelarangan Tayub dan tari Gambyong, atau pemberangusan ritual-adat Dayak atas nama hegemoni agama.

Kasus-kasus sejarah ketidakadilan atas nama (rejim) agama yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, sikap keagamaan legal-formal yang bersifat hitam-putih dan pandangan monolitik tentang pemikiran keagamaan, sehingga menghilangkan kesadaran akan adanya entitas dan kedirian yang lain (*the otherness*). Segala yang berbeda dipandang salah dan sesat, dengan landasan *fa ma ba'da al haqq illa al-dalal*: tiada sesuatu setelah kebenaran (teks) kecuali adalah kesesatan. *Kedua*, interpretasi ajaran Islam yang demikian itu disertai oleh sikap *taqdis al-fikr al-dini* dan doktrin *truthclaim* yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyingkirkan budaya lokal, termasuk di dalamnya seni tradisi lokal. Jargon-jargon pemahaman *fiqhiah*, seperti *bid'ah*, khurafat, syirk, dan haram, telah memvonis bentuk-bentuk ekspresi seni tradisi lokal sebagai hal-hal yang bertentangan dengan agama dan menyesatkan.

Faktor lain di samping ketiga proses simultan di atas adalah hiasan atau aksesoris sosial yang melingkupi seni tradisi lokal atau efek samping yang ditimbulkannya, sering kali dilepaskan dari pesan-pesan spiritual, sosial dan moralitas yang ada di dalamnya, seperti kesan alkoholisme, seksualisme dan judi dalam seni Tayub, Ludruk atau Retroprak Tobong, atau pamer aurat dan gerakan erotis pada seni tari semisal Jaipong, Gandrung Banyuwangi, dan sebagainya.

Realitas di atas, agaknya perlu segera mendapatkan pemecahan-pemecahan yang dalam jargon politik disebut *win-win solution*. Artinya, diperlukan interpretasi ajaran yang mendalam dalam hubungannya dengan realitas sosiobudaya masyarakat. Dalam hal ini penerjemahan dan penafsiran teks ajaran (Islam), diperlukan bantuan analisis kritis dengan berbagai pendekatan seperti filsafat, sosiologi, sejarah, antropologi dan sebagainya. Karenanya, keputusan tentang pemikiran keagamaan tidak serta-merta bersifat menghakimi dan pemberangus kekayaan seni budaya yang ada, tetapi ada pemikiran yang mendalam dan selektif. Di sisi lain, dimensi-dimensi negatif dari kulit-kulit dan efek samping yang menghiasi seni tradisi lokal perlu dianulir dengan mengapresiasi dan menggali filosofi yang terkandung di dalamnya, meliputi pesan-pesan spiritual, sosial dan moralnya. Dengan demikian, akan terjadi dialektika, asimilasi dan akulturasi antara agama (dalam hal ini interpretasi agama yang mendalam dan multidimensional) dan seni tradisi lokal.

Posisi strategis Muhammadiyah sebagai salah satu dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia barangkali sudah selayaknya tampil sebagai salah satu cagar budaya atas seni tradisi lokal, yang pada umumnya sarat akan pesan-pesan filosofis, baik dalam aspek spiritualitas, moral dan mentalitas, maupun pesan sosial. Tampilnya Muhammadiyah dalam peran cagar budaya dapat diperankan dalam gerakan apresiasi seni budaya dalam gerakan keagamaan dan strategi kebudayaannya, seperti kajian-kajian kritis tentang seni budaya, khususnya seni tradisi lokal dengan mengedepankan dimensi positifnya, yaitu pesan-pesan agung yang terkandung didalamnya dan mengupas serta membuang jauh bias-bias dan kesan negatif yang melekat padanya.

Untuk ini diperlukan dialog interaktif antara pemikiran pada ulama, ilmuwan sosial, budayawan dan seniman, serta para pelaku dakwah dan pendidikan, khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Dalam kaitan inilah buku ini dihadirkan kepada para pembaca sekalian yang budiman, melengkapi buku hasil Halaqah Tarjih yang pertama yang telah kami terbitkan awal tahun 2002 dengan judul *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*. Kedua buku ini merupakan hasil penyarian dari diskusi intensif yang berformat campuran antara seminar, *round-table discussion* dan lokakarya yang kami sebut dengan istilah Halaqah Tarjih, karena kami bekerja sama dengan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah sebagai lokomotif utama dari pergeseran paradigma pandangan keagamaan Muhammadiyah, khususnya mengenai seni-budaya lokal ini.

Ucapan terima kasih tulus dari lubuk hati kami sampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan PPI PP Muhammadiyah, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Muhammadiyah University Press*, dan *The Ford Foundation* kantor Jakarta. Kami juga menghaturkan apresiasi kepada komunitas maupun individu seniman dan budayawan yang antusias sekaligus tegang mengikuti dinamika perdebatan yang terkadang bernada cukup sengit dalam sesi-sesi halaqah I maupun II. Tak lupa, kredit dan terimakasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah memungkinkan buku ini hadir secara fisik ditangan pembaca sekalian; Elisa Kurniadewi dan Gufon Fauzi yang telah mentranskrip dialog sebelum pada akhirnya direkonstruksi Pak Thoyibi; Almuntaqo Zain dan Fajar Riza Ul Haq yang menyunting naskah; Dwi Setyaningsih (staf PSB-PS UMS)

Semoga buku ini memberikan kontribusi bagi "ijtihad kebudayaan" dalam mencari simpul-simpul sinergisitas agama dan seni-budaya

lokal di tengah arus budaya global. Upaya konsolidasi wacana agama dan seni-budaya lokal harus menjadi salah satu agenda penting dalam proyek resistensi-kritis budaya lokal terhadap dominasi budaya global. Akhirnya, selamat menikmati sajian wacana yang menantang ini.

Surakarta, medio Oktober 2002

Yayah Khisbiyah

Direktur PSB-PS UMS